

## **Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif**

*Nyarwi*<sup>1</sup>

### **Abstract**

*The non-voter phenomenon has been generating the controversial perspectives from The New Order to the Post-New Order. This paper discusses two important things: the non-voter based on the political movement perspective and political behavior perspective. First, the non-voter phenomenon has been capitalized by political actors as a political instrument to oppose the political regime. Second, according to political behaviorist science perspective, the non-voter has been analyzing as part of political behavior in national or local election event.*

**Kata-kata Kunci:** Golput; dinamika budaya politik; pasca Orde Baru

### **Pendahuluan**

Golongan Putih atau Golput dalam sejarah politik Indonesia selama beberapa dasawarsa telah menarik perhatian berbagai kalangan. Golput sejak tahun 1970an hingga sekarang terus meramaikan kosa kata politik Indonesia. Terminologi Golput hingga saat ini juga terus memun-

---

1 *Nyarwi* adalah Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIPOL UGM, Yogyakarta. Email: gloryasia2008@gmail.com atau markobar\_gloryasia@yahoo.com

culkan beragam intepretasi. Golput seringkali belum dipahami secara tepat. Seiring dengan pupolaritas kosa kata Golput, ada juga kosa kata politik Golhit—Golongan Hitam—dan juga *Ghost Voters*—pemilih hantu.

Dalam riset-riset perilaku pemilih, Golput juga belum menjadi prioritas terpenting. Beberapa riset dan survey dalam Pemilu dan Pilkada, fokus riset pada umumnya belum ditujukan pada kecenderungan pemilih Golput terhadap para kandidat maupun partai. Model riset dan survey yang dilakukan ini hanya mampu memprediksi kecenderungan suara Golput yang akan muncul pada saat pemilihan. Bahkan secara umum, tidak banyak riset yang memfokuskan dan mengkaji secara serius fakta Golput yang berkembang dalam pemilu.

Tulisan ini hendak membahas bagaimana dinamika dan kontroversi Golput dalam sejarah politik di Indonesia. Beragam pendefinisian terhadap Golput juga akan dipaparkan dalam artikel ini, termasuk di dalamnya, alasan-alasan dan aspek-aspek dari fenomena Golput di Indonesia. Di samping itu, juga akan dipaparkan bagaimana fenomena dan kecenderungan Golput dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wapres dan Pilkada. Selain itu, artikel ini juga akan mengupas bagaimana kecenderungan studi Golput yang berkembang selama ini.

### **Sekilas Perkembangan Golput di Indonesia**

Gerakan Golput di Indonesia dimotori oleh sekelompok aktivis pro demokrasi pada awal Orde Baru. Salah satu motor penggeraknya adalah Arif Budiman. Tercatat, pada hari Kamis, 3 Juni 1971, Arief Budiman yang didampingi eksponen generasi muda, seperti Imam Waluyo, Julius Usman, Husin Umar, dan beberapa aktivis lain memproklamasikan gerakan moral yang dinamakan Golongan Putih (Golput). Acara "proklamasi Golput" disampaikan di Gedung Balai Budaya Jakarta. Pada saat proklamasi Golput disampaikan, beragam pamflet bertebaran di Ibu Kota. Tema-tema "*Tidak Memilih Hak Saudara*," "*Tolak Paksaan dari Manapun*," dan "*Golongan Putih Penonton yang Baik*" melekat pada setiap poster yang berlambangkan segi lima dengan warna dasar putih di dalamnya.

Pada masa awal Orde Baru, terutama sejak akhir 1969, terus terjadi ketidakpuasan di kalangan orang muda di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang (UU) Pemilu yang tidak demokratis dipaksakan kepada parpol. Menurut Arief Budiman, UU tersebut telah mematikan

kekuatan-kekuatan politik baru dalam pemilu selain partai politik yang ada dan Golkar. Golkar dengan dukungan militer dinilai telah mengecewakan kalangan muda dan masyarakat karena dianggap telah menginjak-injak hak asasi dan demokrasi rakyat (*Kompas*, 24, Februari, 2004).

Pada masa Orde Baru, Golput dianggap sebagai kekuatan simbolik perlawanan terhadap rezim. Pada Pemilu 1971, Golput diproklamasikan sebagai cara protes terhadap penguasa Orde Baru yang cenderung memusatkan kekuasaan sehingga menghambat pengembangan demokrasi. Di mata para pemrotes, Pemilu 1971 tidak lebih sebagai ajang pemberian legitimasi kepada penguasa. Demikian juga pada Pemilu 1977 sampai 1987 yang difungsikan untuk menghimpun legitimasi bagi keutuhan format politik Orde Baru, yang terkonsentrasi pada satu pusat kekuasaan. Di samping itu, mereka memprotes pemilu yang tidak lebih cuma bertujuan mencari legitimasi bagi pembangunan yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dan melebarnya ketimpangan sosial.

Pada penyelenggaraan pemilu masa Orde Baru (1977 hingga 1997) nampak suara-suara kritis ajakan golput terus menguat, terutama di kalangan mahasiswa dan aktivis pemuda. Pemilu Orde Baru dinilai hanya sebuah pesta sesaat dan semua elemen politik akan kembali menjadi satu suara kembali saat pemilu usai. Hasil Pemilu juga dianggap tidak akan berpengaruh terhadap kondisi politik. Sebab, hanya 40 persen anggota MPR yang dihasilkan pemilu, sementara bagian terbesar (60 persen) diangkat oleh penguasa. Kendatipun hanya 40 persen anggota MPR yang dihasilkan melalui Pemilu 1997, besaran angka Golput dalam pemilu selalu menjadi salah satu indikator ketakutan Rezim Orde Baru.

Enam tahun kemudian pasca reformasi, tepatnya menjelang Pemilu 2004, Arif Budiman—mantan Proklamator golput—berpendapat ber-golput hukumnya "tidak wajib" seperti pada tahun 1972. Menurutnya pada tahun 1972, partai-partai yang tak disukai pemerintah saat itu dilarang berdiri (kembali), yakni Masyumi dan PSI. Jadi, ada hambatan untuk berdemokrasi. Apalagi terjadi pemaksaan kasar bagi rakyat untuk memilih Golkar. Karena itu menurutnya ber-golput hukumnya wajib, sebagai protes atas kesewenang-wenangan. Sedangkan untuk Pemilu 2004, partai-partai berhak berdiri, tidak bisa dihalangi oleh pemerintah, sepanjang memenuhi kriteria administratif. Karena itu menurutnya memilih tidak lagi wajib memboikot pemilu pada tahun 2004. Akan tetapi,

jikalau memang materi yang akan dipilih dianggap ada di bawah standar, maka golput menurutnya tetap halal dilakukan (Budiman, *Kompas*, 11, Desember, 2003).

Dalam situasi Rezim yang otoriter, propaganda Golput dan juga besaran angka Golput menjadi salah satu indikator kegagalan pembangunan politik Indonesia. Sebagai fenomena politik, Golput pada masa rezim otoriter nampak mengalami politisasi yang luar biasa. *Pertama*, bagi kalangan yang menamakan diri kelompok pro demokrasi dan oposisi (seperti Arif Budiman dkk) menggunakan propaganda ajakan Golput untuk melakukan penentangan kepada rezim. *Kedua*, rezim juga mengalami phobia terhadap fenomena Golput. Sehingga kalangan yang menyuarakan, mengajak, dan melakukan Golput dalam Pemilu dianggap sebagai pembangkang pemerintah. Golput yang secara natural merupakan ekspresi politik yang biasa di berbagai negara demokrasi kemudian dianggap sebagai "ancaman" yang bisa mendelegitimasi kekuasaan rezim.

Dari berbagai definisi dan analisis terhadap Golput, nampak ada kecenderungan pengaburan analisis terutama terkait dengan mencampurkan golput dari perspektif gerakan politik dan Golput dari perspektif studi perilaku pemilih. Kedua hal tersebut tentu saja berbeda. Yang pertama, terkait dengan klaim dan politisasi angka Golput. Yang kedua, terkait dengan tingkat *voter turnout* dalam sebuah arena pemilu.

### Kontroversi Definisi Golput

Dalam terminologi ilmu politik, Golput seringkali disebut dengan *non-voter*. Terminologi ini menunjukkan besaran angka yang dihasilkan dalam *event* pemilu di luar *voter turn out*. Fenomena *voter* dan *non-voter* ini menjadi fokus utama studi *voting behavior* yang berkembang dalam ilmu politik<sup>2</sup>. Ada beberapa kategori para pemilih yang tidak mengguna-

---

2 Di AS pada dekade 1950-an, penjelasan teoritis tentang *voting behavior* ini cenderung didasarkan pada dua model, yakni lewat pendekatan sosiologis dan psikologis. Di lingkungan ilmuwan sosial di AS, pendekatan sosiologis awalnya dikembangkan oleh mazhab Columbia, yaitu *The Columbia School of Electoral Behavior*. Sementara itu pendekatan psikologis lebih banyak dikembangkan oleh mazhab Michigan, *The Michigan Survey Research Center*. Perbedaannya, jika mazhab Columbia lebih difokuskan pada pendekatan sosiologis, mazhab Michigan difokuskan pada faktor psikologis para pemilih dalam menentukan pilihannya. Di luar itu, ada pendekatan lain

kan hak pilih (*non-voters*). Menurut Louis DeSipio, Natalie Masuoka dan Christopher Stout (2006 : 8) terdapat tiga kategori *non-voter*. *Pertama, Registered Not Voted*, yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih. *Kedua, Citizen-not Registered*, yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih. *Ketiga, Non-Citizen*, yakni mereka yang dianggap bukan warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga tidak memiliki hak pilih.

Fenomena Golput dalam demokrasi terkait dengan seberapa besar derajat partisipasi para pemilih di dalam Pemilu. Derajat angka partisipasi pemilih dalam sebuah pemilu inilah yang kemudian dikenal dengan *voter turnout*. Selama beberapa dasawarsa terakhir, angka *voter turnout* ini terus mengalami fluktuasi, baik di negara-negara yang sudah lama menerapkan demokrasi maupun yang mengalami masa transisi demokrasi.

*Voter turnout* merupakan persentasi angka pemilihan yang didapatkan dalam sebuah pemilu. Angka ini didapat setelah dibandingkan dengan keseluruhan jumlah pemilih yang terdaftar dalam *event* Pemilu. Secara umum *voter turnout* dipengaruhi oleh faktor-faktor: 1) ekonomi; 2) demografi; 3) budaya; 4) teknologi dan 5) Institusional. Masing-masing negara memiliki angka *voter turn out* yang beragam karena perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan kosakata politik, pemilu dan pilkada akhir-akhir ini muncul beberapa terminologi di luar golput. Beberapa terminologi yang berkembang antara lain *ghost voters*, golhit dan juga pemilih radikal (*radical voters*). Keempat konsep tersebut seringkali muncul menjelang dan pasca *event* Pemilu dan Pilkada.

Ada sejumlah definisi terkait dengan fenomena Golput di Indonesia. *Pertama*, definisi yang diberikan oleh Eep Saifullah Fatah (2007). Menurutnya golongan putih adalah mereka yang tidak menggunakan

---

yang pernah ditulis Dennis Kavanagh (1983) dalam buku *Political Science and Political Behavior*. Menurutnya, ada lima model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional.

3 Seperti Amerika Serikat dalam sejarah pemilu yang dilaluinya, angka *voter turn out* sekitar 70 %. Sedangkan Australia angka *voter turnout* bisa mencapai 95 %.

hak pilihnya dalam pemilu dengan berbagai macam alasan. Fatah (2007) mengkategorikan Golput dalam empat jenis: golput teknis, golput teknis-politis, golput politis dan golput ideologis. Golput teknis, yakni mereka yang karena sebab teknis tertentu (keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tak sah. Golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain (*Kompas*, 24 Juli, 2007).

*Kedua*, golput didefinisikan sebagai pemilih hantu (*ghost voter*), yang diberikan oleh M.Qodari (2007). Menurut pemilih hantu mengacu pada nama-nama pemilih yang menurut daftar pemilih yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berhak untuk memilih, tetapi setelah dicek ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena aneka alasan (M.Qodari, *Kompas*, 2 Juli, 2007).

*Ketiga*, golput sebagai pemilih radikal (*radical voters*) yang didefinisikan oleh Fajroel Rahman (2004). Menurut pemilih radikal adalah para pemilih pada Pemilu 2004 yang berdiri pada kriteria demokrasi paling dasar (*radix/akar*) yang merupakan prasyarat demokrasi (*conditio sine qua non*). Kriteria itu memberi standar perbandingan dengan kinerja aktual dan ideal demokrasi, yaitu : (1) penegakan HAM (Deklarasi Universal HAM, kovenan sipil-politik, kovenan ekonomi-sosial-budaya, konvensi perempuan dan lainnya; (2) penegakan hukum konstitusional-demokratis yang adil dan tidak memihak; (3) supremasi sipil; (4) pemisahan kekuasaan pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang memungkinkan *check and balances*; (5) pemilu berkala dan bebas, yang menunjukkan mayoritas penduduk ikut memilih dan dipilih; (6) kemakmuran ekonomi dengan jaminan kesejahteraan sosial bagi setiap orang tanpa kecuali.

Menurut Fajroel Rahman (2004), para pemilih radikal lalu menerapkan kriteria demokrasi paling dasar itu pada realitas politik di Indo-

nesia sehingga pada Pemilu 2004 mereka hanya dan hanya memilih para calon legislatif maupun calon presiden-wapres yang memenuhi syarat, (1) tidak terlibat pelanggaran HAM; (2) tidak terlibat KKN; (3) bukan parpol atau fungsionaris parpol dan organisasi korporatisnya yang menjadi mesin politik kediktatoran fasis; (4) bukan parpol atau perorangan yang mendukung keterlibatan lembaga TNI/Polri di bidang politik, dan atau bisnis; (5) bertempat tinggal di daerah pilihannya; (6) berpihak terhadap caleg perempuan dan pemuda untuk menuntaskan regenerasi kepemimpinan politik (M.Fadjoel Rachman, *Kompas*, 7 Januari 2004)

Indra J. Pilliang (2004) melihat Golput kaitannya dengan penyeragaman budaya politik di Indonesia pasca Orde Baru. Menurutnya dalam masyarakat baru Indonesia yang sedang tumbuh, golput hanyalah satu fenomena yang belum bisa dikategorikan secara akademis.

Menurutnya, golput bisa dibagi tiga (*Kompas*, 28 Juli, 2004). *Pertama*, golput ideologis, yakni segala jenis penolakan atas apa pun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Golput jenis ini mirip dengan golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti-state, ketika state dianggap hanyalah bagian korporatis dari sejumlah elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Bagi golput jenis ini, produk UU sekarang, termasuk UU pemilu, hanyalah bagian dari rekayasa segolongan orang yang selama ini mendapatkan kenikmatan dan hak-hak khusus. Sistem Pemilu 1999, sebagaimana diketahui, hanyalah memilih tanda gambar sehingga rakyat tak bisa memilih orang. Demokrasi berlangsung dalam wilayah abu-abu, semu dan sumir.

*Kedua*, golput pragmatis, yakni golput yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si memilih. Orang-orang yang tetap mencari nafkah ketika hari pemilu atau orang-orang yang tetap meneruskan tidurnya karena begadang semalaman akibat nonton bola, termasuk golput pragmatis ini. Sikap mereka setengah-setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara percaya dan tidak percaya.

*Ketiga*, golput politis, yakni golput yang dilakukan akibat pilihan-pilihan politik. Kelompok ini masih percaya kepada negara, juga percaya kepada pemilu, tetapi memilih golput akibat preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka.

## Dinamika Golput Dalam Pemilu dan Pilkada

Peristiwa pemilu di Indonesia terus diwarnai hadirnya perilaku Golput. Golput secara natural merupakan ekspresi politik yang biasa dari setiap warga negara. Sebagai hak politik, Golput merupakan hak para warga negara yang memiliki hak pilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam setiap arena Pemilu dan Pilkada.

Praktik demokrasi di Indonesia memungkinkan berlangsungnya skala berlangsungnya golput yang beragam. *Pertama*, fenomena golput yang berlangsung dalam arena Pilpres. *Kedua*, fenomena golput yang berlangsung dalam arena Pemilu Legislatif, baik untuk memilih anggota DPR RI, DPRD dan DPD. *Ketiga*, fenomena golput dalam arena Pilkada, baik untuk Pilkada Propinsi maupun Pilkada Kabupaten/Kota.

Kapan besaran angka Golput dalam Pemilu kian memiliki makna yang signifikan? *Pertama*, ketika konteks kepentingan kolektif dan muatan politik muncul di balik besaran angka Golput dilihat secara diametral dengan struktur dan legitimasi rezim penguasa otoriter. Pengalaman di Indonesia selama rezim Orde Baru, besaran angka Golput menjadi semakin memiliki arti penting bagi rezim penguasa. Oleh karena itu, rezim akan terus berupaya keras bagaimana meminimalisir besaran angka Golput. Bahkan terkesan Rezim phobia terhadap Golput yang dianggap akan potensial merongrong kekuasaan Orde Baru.

### Jumlah Angka Golput Pemilu Legislatif di Indonesia

No	Pemilu	Jumlah Golput (dalam %)
1.	Pemilu 1955	12,34 %
2.	Pemilu 1971	6,6 % (3,3 % tidak menggunakan haknya)
3.	Pemilu 1977	8,40 %
4.	Pemilu 1982	9,61 %
5.	Pemilu 1987	8,39 %
6.	Pemilu 1992	9,05 %
7.	Pemilu 1997	10,07% (6,4 % tidak menggunakan haknya)
8.	Pemilu 1999	10,40 %
9.	Pemilu 2004	23,34 %

Keterangan : Diolah dari berbagai sumber.



Kedua, dalam konteks *political marketing*, besaran angka Golput akan berdampak pada persebaran suara parpol dan kandidat. Dengan kata lain, dalam konteks era demokrasi langsung, besaran angka Golput telah menjadi faktor penting dalam perolehan kursi legislatif (DPR RI dan DPRD), kemenangan Pilpres dan kemenangan Pilkada. Derajat fluktuasi angka Golput menjadi kian menentukan ketika kompetisi antar kandidat berada dalam selisih angka yang kecil. Fluktuasi angka Golput kian menentukan ketika kompetisi antar kandidat dan parpol semakin sengit dalam ketiga jenis arena pemilu tersebut.<sup>4</sup>

Ketiga, angka Golput yang lebih besar dari jumlah pemilih juga menyisakan persoalan terkait dengan legitimasi pemilu. Demokrasi melalui arena pemilihan secara otomatis akan menempatkan rejim politik yang terpilih dalam pemilu langsung sebagai pemegang kekuasaan. Ketika jumlah pemilih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pemilih Golput, maka hal ini akan memunculkan krisis legitimasi dalam sistem politik. Demokrasi melalui sistem pemilu masih sekedar memberikan mekanisme representasi bagi mereka yang menggunakan hak pilihnya. Padahal, sebagai warga negara, para pemilih Golput memiliki hak politik yang sama dengan pemilih yang lain.

Tidak hanya dalam Pemilu, Golput juga menjadi fenomena yang marak dalam Pilkada. Selama beberapa tahun terakhir, fenomena Pilkada di sejumlah daerah terus diwarnai dengan menguatnya angka Golput.

---

4 Pada arena Pemilu legislatif, kompetisi nampak terutama dalam menembus angka Electoral Threshold (ET) dan perebutan syarat untuk mendapatkan kursi DPR dan DPRD di setiap daerah pemilihan (Dapil). Oleh karena itu, dalam pemilu 1999 dan 2004, kadangkala beberapa partai mampu mendapatkan jumlah kursi lebih besar kendatipun dari total jumlah suara pemilu legislatif yang diperolehnya lebih kecil dari partai-partai yang menjadi kompetitornya. Di sini *electoral vote* lebih menentukan dibandingkan *total vote*. Dalam Pilpres, total perolehan suara (*total vote*) adalah yang paling menentukan kemenangan pasangan kandidat. Hal yang sama juga berlaku dalam Pilkada dimana *total vote* yang akan menjadi penentu. Dalam hitungan *electoral vote* maupun *total vote*, keberadaan golput (*non-voter*) menjadi sangat menentukan. Sebab, besaran angka *non-voter* ini memiliki keterkaitan secara erat dan langsung dengan kompetitor lainnya (kandidat atau parpol). Sebagai misal, seorang kandidat—dalam Pilpres atau Pilkada—jika kehilangan 10 % suara berarti angka tersebut sekaligus memberikan peluang peningkatan perolehan suara kepada kandidat lainnya maksimal sebesar 10 %.

Fenomena terakhir dapat disimak misalnya dalam Pilkada Jawa Tengah yang mencatat angka Golput paling tinggi dalam Pilkada propinsi. Laporan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah tentang hasil pilgub tahun 2008 lalu menunjukkan tingginya akan golput. Boleh dikatakan angka partisipasi dalam pesta demokrasi yang digelar tanggal 22 Juni 2008 relatif kecil yakni hanya 58,55 persen. Dari total pemilih sebanyak 25.855.542 orang, yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 10.739.152 orang atau 41,54 persen. Dari angka golput tersebut paling banyak terdapat di Kabupaten Kudus yang mencapai 68,20 persen. Sementara daerah lain yang juga sangat signifikan kebanyakan di wilayah pantura yakni Jepara, Demak, Pati dan Brebes (*Suara Merdeka*, 3 Juli 2008).

Angka golput dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2008 mencapai 45,25 persen, sementara dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur Sumut mencapai 41 persen dan Jawa Barat mencapai 32,6 persen. Pilkada di Kabupaten Pati, dari 951.840 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya hanya 421.700 orang atau 44,30 persen. Dengan kata lain, yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 530.140 orang atau 55,70 persen. Angka ini sangat jauh di bawah rata-rata tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada langsung sebelumnya di 22 kota/kabupaten di Jateng selama 2005-2006 yang sebesar 72,35 persen. Bandingkan pula dengan rata-rata angka partisipasi pemilih dalam pilkada langsung secara nasional yang sebesar 74,60 persen. Jumlah "golput" yang sebesar 55,70 persen merupakan angka yang luar biasa, merupakan rekor jumlah golput di Jawa Tengah dan nasional. Sebelumnya, angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya terbesar di Jateng terjadi dalam pilkada di Pemalang dengan 35,06 persen. Namun jumlah ini masih dianggap wajar, karena masih di bawah ambang batas 40 persen (*Bisri, Suara Merdeka*, 28 Juli 2006).

Dalam sejumlah arena Pilkada di Jawa Timur, angka golput juga nampak cukup besar. Bahkan golput sempat menjadi pemenang dalam Pilkada. Sebagai contoh dalam Pilkada di Kabupaten Blitar, pemenangnya adalah golongan putih atau golput. Pasangan Hery Nugroho-Arif Fuadi meraih suara terbanyak, tetapi jumlah suaranya dikalahkan oleh golput yang mencapai 44 persen (*Kristanto, Kompas*, 15 Desember 2005). Sedangkan Pilkada di Kota Surabaya tingkat partisipasinya juga hanya 49,64 persen.

Golput sebagai pemenang Pilkada juga terjadi di sejumlah daerah di luar Jawa, misalnya di Kalimantan Timur. Sebagai contoh di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kendatipun mantan Bupati Syauckani kembali memenangi pemilihan, proporsi golput terhadap jumlah pemilih terdaftar mencapai 29,3 persen. Peristiwa naiknya angka golput di Kutai Kartanegara tersebut kemudian berimbas pada daerah-daerah lain yang melaksanakan pilkada. Sepanjang Juni hingga Desember, angka golput terus naik. Kisarannya mulai dari 23 persen hingga 44 persen dari jumlah pemilih terdaftar. Jika dirata-rata dari keseluruhan kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkada, angkanya mencapai 31 persen. Angka ini merupakan rekor terbaru sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sebelumnya, pemilu pertama pada tahun 1955, angka golput mencapai 12,3 persen. Pada pemilu-pemilu selanjutnya, angka golput terus naik dan terakhir ditutup pada pilkada tahun 2005.

Bambang Setiawan (2008) menyimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara pola koalisi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada (*Kompas*, 6 Agustus 2008). Bambang Setiawan (2005) juga berpendapat bahwa hal yang menarik di sini adalah setiap besaran proporsi golput pilkada di suatu daerah ternyata berkorelasi secara signifikan dengan angka golput pada pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya, semakin besar proporsi golput di suatu daerah pada pemilu pemilihan presiden tahun sebelumnya, misalnya, semakin besar pula angka proporsi golput pada pilkada. Ini dapat dilihat dari pelaksanaan pilkada Blitar yang angka golputnya tergolong tinggi. Sebelumnya, pada pemilihan presiden putaran kedua, angka proporsi golput mencapai 22,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan golput yang tinggi pada pilkada sebenarnya sudah dimulai dari pemilu sebelumnya yang juga menunjukkan karakteristik masyarakatnya.

Bambang Setiawan (2005) menyimpulkan bahwa jika dibandingkan berdasarkan geografis Jawa-luar Jawa, ada kecenderungan angka golput lebih tinggi di kabupaten dan kota di Jawa. Rata-rata mencapai 30 persen, sedangkan di daerah luar Jawa mencapai 29 persen. Perbedaannya memang tidak mencolok, tetapi melihat lebih tingginya angka golput di Jawa menunjukkan adanya kondisi kritis dan apatis masyarakat. Kondisi ini sebenarnya juga terjadi pada pemilu sebelumnya.

Besarnya angka golput juga ditemui dalam sejumlah *event* Pilkada di Jawa Barat dan Banten. Pilkada di Kota Depok hanya diikuti oleh 58,01 persen pemilih, di Banten 60,83 persen, dan di Bekasi 53,76 persen. Dalam Pilkada Propinsi, sejumlah wilayah di Jawa Barat juga menunjukkan angka golput yang cukup besar. Golongan putih dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Bogor. Nilainya sebanyak 978.803 suara. Jauh lebih tinggi ketimbang raihan suara kandidat Ahmad Heryawan-Dede Jusuf (Hade) dengan 860.845 suara. Lalu pasangan Agum Gumelar- Nu'man Abdul Hakim sebanyak 466.054 suara dan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana dengan 360.150 suara. Tak hanya di kabupaten. Di kota Bogor, Golput juga mewarnai hasil perhitungan suara yakni sebanyak 33.622 ribu jiwa atau sekitar 28 persen.

Tingginya angka golput juga berlangsung di sejumlah *event* Pilkada di wilayah Sumatera. Di Kota Bukittinggi, pilkada hanya diikuti oleh 53,1 persen. Bahkan, di kota kosmopolitan seperti Batam, pilkada hanya mampu menarik perhatian 45,19 persen pemilih.

Dari sini nampak jika dilihat dalam perbandingan horizontal, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada paling rendah justru di wilayah pulau Jawa (68,09 persen) yang paling banyak penduduknya. Sebaliknya, di wilayah-wilayah di luar Jawa, partisipasi masyarakat justru rata-rata lebih tinggi. Paling tinggi adalah di Maluku dan Sulawesi. Padahal, di kedua wilayah ini potensi konflik horizontal selama ini paling tinggi. Terutama Palu dan Ambon, yang selama ini menjadi daerah paling rawan konflik.

Selain itu, sejumlah wilayah yang karena proses urbanisasi yang cepat kemudian menjadi kota yang didukung oleh kota-kota satelit, cenderung tingkat partisipasinya makin rendah. Daerah-daerah di Jawa, mengacu pada hasil analisis Aris Ananta dan kawan-kawan, merupakan wilayah yang paling tinggi tingkat urbanisasinya (Aris Ananta, Evi Nurvidya Arifin dan Leo Suryadinata, 2004), sehingga wajar jika dalam pilkada yang berlangsung tahun 2005 dan 2006 terlihat dengan jelas tingkat partisipasi masyarakatnya paling rendah. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Robert Putnam (1993), yang menyatakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi adalah timbulnya wilayah-wilayah suburban atau kota-kota satelit.

## Memahami Kembali Golput di Indonesia

Pasca Orde Baru, Golput masih terus menjadi sebuah kontroversi. Perdebatan tentang Golput masih terus menyisakan berbagai asumsi di kalangan ilmuwan dan analis politik, sosiologi, anthropologi dan komunikasi politik. Menjelang Pemilu 2004, analisis terhadap Golput pada umumnya didasarkan atas satu perspektif tertentu (Haromain, *Kompas*, 23 September 2003). Sebagai contoh pendapat yang dikemukakan oleh Haromain (2003) yang menganalisis Golput terkait dengan kegagalan partai politik. Menurutnya ada tiga hal yang menyebabkan golput mungkin menguat dalam Pemilu 2004. *Pertama*, kian menguatnya persepsi masyarakat bahwa partai politik tidak sepenuhnya berpikir tentang aspirasi dan kepentingan rakyat. Terjadi disparitas amat lebar antara agenda yang diusung partai politik dengan aspirasi rakyat (konstituennya). *Kedua*, dalam sejarahnya, selama ini pemilu lebih memosisikan rakyat sebagai instrumen legitimasi, dan hanya bersifat prosedural. Bahkan, Pemilu 1999 yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan bangsa ternyata tidak jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu 1999 "gagal" memberikan harapan baru, apalagi menjadi starting point bagi proses penyelesaian segala persoalan (keruwetan) yang mendera bangsa ini. *Ketiga*, menguatnya kejenuhan publik (masyarakat) ditambah konflik internal partai politik. Konflik internal dan buruknya kinerja partai politik berpengaruh terhadap penyikapan masyarakat atas keberadaan parpol.

Terkait dengan perkembangan rasionalitas pemilih Indonesia, Nasikun (2004) berpendapat bahwa Golput masih merupakan suatu "makhluk" asing di dalam sebuah sistem politik kesukuan atau aliran. Di dalam bentuknya seperti yang dikenal dalam tradisi perpolitikan yang berkembang di negara-negara maju, golput tidak dikenal, atau lebih tepat tidak populer di dalam sebuah sistem politik kesukuan atau aliran seperti yang selama ini berkembang di Indonesia. Menurut Nasikun (2004) berbeda dari yang terjadi di dalam sistem politik rasional yang berkembang di negara-negara maju, kehadiran politik golput di dalam sistem politik kesukuan atau aliran di Indonesia selama ini tidak memperoleh dukungan dari berkembangnya proses industrialisasi dan lahirnya suatu lapisan kelas menengah yang cukup tebal dan "independen". Menurut Nasikun, jikalau kehadiran lapisan kelas menengah sudah terjadi juga, jumlah mereka bukan hanya belum cukup berarti, tetapi juga terpecah belah oleh

beragam orientasi ideologis, dan lebih dari semua itu, tidak memiliki ciri-ciri suatu kelas menengah yang diperlukan bagi berkembangnya politik golput (*Kompas*, 6 Januari, 2004).

Berbeda dengan Nasikun, Hendardi (2004) mempercayai bahwa fenomena Golput dalam berbagai *event* pemilu di Indonesia bersumber dari rasionalitas pemilih. Ada beberapa alasan yang dikemukakan terkait dengan rasionalitas pemilih. Pilihan golput harus dilihat sebagai upaya membuka ruang kebebasan pemilu yang lain. Munculnya golput di Indonesia pada awal dasawarsa 1970-an adalah ekspresi sikap kritis. Kini, adanya suara golput juga patut diposisikan sama seperti sebelumnya terhadap mereka yang terlibat dalam perebutan kekuasaan. Perilaku politisi dalam lima tahun terakhir, baik di parlemen maupun pemerintahan di pusat dan daerah, mengecewakan warga negara yang sebelumnya memilih mereka. Dari sinilah rasionalitas golput menemukan jawabannya. Golput memalingkan suara untuk tak memberikan kepada calon-calon yang akan duduk pada lembaga-lembaga negara, bahkan "demokrasi versi elite negara". Oleh karena itu, Golput perlu dibaca sebagai sikap mengambil jarak dari pikatan para juru kampanye. Di sinilah arti pentingnya dengan mempertahankan ruang-ruang lain yang tak selalu tunggal (*Kompas*, 6 Juli, 2004).

Pendapat Nasikun (2004) dan Hendardi (2004) ini kemudian disusul oleh fakta politik dalam Pemilu 2004 yang menunjukkan, jumlah angka Golput cukup besar. Terlepas dari faktor rasionalitas politik dan non-rasionalitas politik, besaran angka Golput menjadi bahan perhatian penting. Jumlah pendukung dalam Pemilu legislatif 2004 golput mencapai 34.509.246, terdiri dari pemilih terdaftar yang tidak datang ke TPS 23.551.321, ditambah suara tidak sah 10.957.925. Persentasenya 23,34 persen terhadap total pemilih terdaftar. Jumlah ini lebih besar daripada perolehan parpol pemenang pemilu, seperti Partai Golkar 24.480.757 (16,54 persen), PDI-P 21.026.629 (14,21 persen), dan PKB 11.989.564 (8,10 persen). Jumlah pemilih terdaftar untuk pemilu legislatif 5 Juli 2004 adalah 148.000.369, sesuai keputusan KPU No 23/2004. Menurut perhitungan manual yang dilakukan KPU 23 April-4 Mei 2004, jumlah pemilih yang menggunakan haknya 124.449.038 (83 persen), suara yang sah 113.498.755, dan suara tidak sah 10.957.925 (8,81 persen) (Rachman, *Kompas*, 15 Mei, 2004).

Dari beberapa pendapat dan asumsi yang dilakukan terhadap persepsi, opini dan fakta Golput dalam berbagai *event* pemilu seringkali kurang disertai dengan kecermatan perspektif dan metode riset yang dilakukan terhadap Golput. Saiful Mujani (2004) melihat adanya mitos Golput dalam Pemilu 2004 yang menemukan 23 persen pemilih tidak menggunakan hak pilih. Ia menyimpulkan bahwa klaim besarnya jumlah golput bagi masyarakat kita kini masih merupakan mitos dibandingkan dengan kenyataan (*Kompas*, 25 Mei, 2004). Dalam hal ini Mujani melihat bahwa besarnya angka Golput terkait dengan kemampuan teknis dan administratif aparaturnya pelaksanaan pemilu, dan tidak terkait dengan adanya kultur politik para pemilih Indonesia.

### Melacak Studi Golput di Indonesia

Perkembangan yang ada hingga saat ini dalam riset-riset pemilih, Golput juga belum menjadi prioritas terpenting. Beberapa riset dan survey dalam Pemilu dan Pilkada, umumnya belum berfokus pada kecenderungan pemilih Golput terhadap para kandidat maupun partai. Model riset dan survei yang dilakukan ini hanya mampu memprediksi kecenderungan suara Golput yang akan muncul pada saat pemilihan. Bahkan secara umum, tidak banyak riset yang memfokuskan dan mengkaji secara serius fakta Golput yang berkembang dalam *event* pemilihan (baik pemilu dan Pilkada).

Golput dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Golput dapat menggunakan pendekatan model sosiologis, psikologis dan *rational-choice* dalam studi perilaku pemilih. Ketiga pendekatan tersebut sebenarnya memberikan sejumlah variabel untuk mengkaji perilaku pemilih yang menggunakan hak politiknya. Namun, variabel-variabel yang digunakan dari ketiga pendekatan tersebut juga dapat digunakan untuk mengkaji perilaku pemilih yang tidak menggunakan hak politiknya atau pemilih Golput.

*Pertama*, Model Sosiologis. Model sosiologis merupakan model paling awal dalam tradisi studi perilaku memilih. Model ini dikembangkan dengan asumsi bahwa perilaku memilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis para pemilih, terutama kelas sosial, agama, dan kelompok etnik/kedaerahan. *Kedua*, Model Psikologis. Kalau faktor sosiologis menekankan

pentingnya latar belakang sosiologis pemilih, maka model psikologis memberikan perhatian kepada aspek psikologis pemilih. Pilihan seseorang terhadap partai atau kandidat tertentu bukan hanya karena partai mempunyai kesamaan latar belakang dengan pemilih, tetapi juga secara psikologis dekat dengan pemilih. Aspek sosiologis dan psikologis ini saling berkaitan. Faktor-faktor sosiologis tersebut tidak langsung mempengaruhi keputusan untuk memilih, tetapi diperantarai oleh persepsi dan sikap, baik terhadap faktor sosiologis tersebut maupun terhadap partai politik. Ada sejumlah faktor psikologis yang berpengaruh terhadap perilaku pemilih. Salah satu variabel penting dari model psikologis ini adalah identifikasi seseorang terhadap partai (*partisanship/ Party ID*)<sup>5</sup>. Faktor kedua adalah sosialisasi politik di lingkungan keluarga, di tempat kerja, dan di lingkungan masyarakat di mana seseorang bertempat tinggal membantu proses pembentukan identitas partai ini. Kebiasaan membicarakan masalah publik dalam keluarga, di tempat kerja, dan di lingkungan masyarakat sekitar di mana seseorang tinggal, akan membantu seseorang terlibat dengan masalah-masalah publik. Ketiga, model ekonomi-politik (*rational-choice*). Model rasional/ ekonomi politik menekankan kepada penilaian rasional pemilih. Model rasional ini menempatkan pentingnya evaluasi pemilih terhadap partai yang bersaing dalam Pemilu. Sejumlah studi mengenai perilaku pemilih menempatkan isu ekonomi sebagai masalah penting bagi pemilih. Teori tentang ekonomi politik ini diadaptasi dari lapangan ekonomi. Ahli politik mengadaptasi teori tersebut untuk menjelaskan perilaku pemilih dengan memperhitungkan apa dampak yang bisa dirasakan langsung oleh pemilih di masa datang kalau ia memilih partai tertentu.

Beberapa pendapat dan asumsi yang dilakukan terhadap persepsi, opini dan fakta Golput dalam berbagai *event* pemilu seringkali kurang disertai dengan kecermatan perspektif dan metode riset yang dilakukan terhadap Golput. Mujani (2004) melihat adanya mitos Golput dalam Pemilu 2004 dengan menunjukkan 23 persen pemilih tidak

---

5 Identifikasi Partai adalah perasaan keterlibatan dan memiliki yang terdapat dalam diri seseorang terhadap sebuah partai politik. Sehingga, ini bisa dikatakan sebagai sikap dan perasaan psikologis yang terdapat di dalam diri seseorang. Kedekatan ini umumnya terbangun dalam proses yang panjang. Identitas partai politik (Party ID) ini yang memperantarai faktor-faktor sosiologis dengan opini dan sikap terhadap partai politik.



menggunakan hak pilih. Menurutnya, 23 persen pemilih memang tidak masuk dalam hitungan hasil pemilu resmi KPU, bukan karena mereka golput atau protes terhadap keadaan politik sekarang, tetapi karena alasan teknis seperti belum terdaftar, salah memilih, dan kesalahan ini bukan sengaja dilakukan tetapi karena tidak tahu pasti bagaimana memilih dengan benar.

Sejumlah studi awal mengenai perilaku pemilih yang menggunakan hak pilihnya maupun pemilih Golput sempat dilakukan oleh Siaful Mujani. Studi ini sebenarnya lebih melihat faktor-faktor yang mempengaruhi mereka yang menggunakan hak pilih. Namun hasil analisis yang disajikan juga mulai membicarakan mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam arena pemilihan.

Mujani (2007) melakukan studi ini dengan menggunakan metode survei dan berbasis pada data survei. Untuk menjawab berbagai asumsi yang berkembang mengenai Golput, maka analisis terhadap data survey dilakukan. Ia menjelaskan bahwa faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap fluktuasi angka Golput meliputi antara lain: *Pertama*, dengan pendekatan sosiologis. Faktor-faktor yang mungkin saja memberikan pengaruh yaitu pendapatan, jenis pekerjaan, pendidikan, urbanisme, kelompok umur, agama, kelompok etnik, dan jender. *Kedua*, dengan pendekatan psikologis (*political engagement*). Faktor-faktor yang diasumsikan memberikan pengaruh yaitu informasi politik (ekspos pada berita publik), intensitas diskusi politik, efikasi politik (persepsi bahwa memilih penting, memilih dapat memperbaiki keadaan, satu suara penting walaupun hanya satu, persepsi dapat mempengaruhi keputusan publik), *political interest* (intensitas ketertarikan dengan politik), dan partisanship (identifikasi diri dengan partai politik). *Ketiga*, dengan pendekatan ekonomi-politik. Faktor-faktor yang mungkin saja memberikan pengaruh misalnya persepsi insentif selektif (pemilu memperbaiki kondisi ekonomi diri sendiri, merasa terisolasi secara sosial kalau tak ikut memilih, memilih adalah wujud dari seorang warga yang baik), persepsi insentif kolektif (kalau tak ikut memilih siapa yang memilih; kalau tidak memilih partai atau calon yang diinginkan kemungkinan kalah; optimis bahwa partai atau calon yang didukungnya akan menang).

Berdasarkan data survei Pemilu 2004 analisis dengan pendekatan sosiologis dan psikologis yang dilakukan oleh Siaful Mujani (2004) menyimpulkan beberapa hal penting. *Pertama*, dengan perspektif sosiologis.

Penelitian tersebut menemukan bahwa ada beberapa faktor sosial ekonomi dan demografi yang memiliki korelasi dengan voter turnout dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Putaran I dan Pemilu Presiden Putaran II sebagaimana yang diperlihatkan dalam tabel berikut.

Korelasi Sosial-ekonomi dan Demografi dengan Voter Turnout

	Turnout legislatif 2004	Turnout Presiden I 2004	Turnout Presiden II 2004
Laki-laki	TS	.075*	TS
Umur	TS	.140**	.190**
Urban	TS	-.164**	-.072*
Pendidikan	-.066*	-.119**	-.175**
Pendapatan	TS	-.069*	-.119**
Intensitas ibadah	.151**	.083**	.111**
Civic engagement	.113**	TS	.111**

Sumber: Saiful Mujani (2007), Voting Behavior Kasus Indonesia. Bahan Kuliah di Program Pasca Sarjana Master Manajemen Komunikasi FISIP UI. Maret, 2007

Analisis *bivariate* terhadap jenis kelamin hanya menunjukkan bahwa jenis kelamin hanya memiliki korelasi yang signifikan dengan *voter turnout* dalam Pemilu Presiden 2004 Putaran I. Analisis *bivariate* menunjukkan bahwa umur hanya memiliki korelasi signifikan dengan *voter turnout* dalam Pemilu Presiden Putaran I dan II. Analisis terhadap indikator urban menunjukkan adanya korelasi negatif dengan *voter turnout* Pemilu Presiden 2004 Putaran I dan Putaran II. Analisis *bivariate* terhadap pendidikan menunjukkan adanya korelasi negatif dengan *voter turnout* Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Presiden 2004 Putaran I dan II. Analisis *bivariate* terhadap indikator pendapatan dan pendidikan juga menunjukkan adanya korelasi negatif dengan Pemilu Presiden 2004 Putaran I dan Putaran II. Sedangkan analisis *bivariate* terhadap *civic engagement* menunjukkan adanya korelasi positif dengan *voter turnout* Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Presiden Putaran II.

Kedua, dengan pendekatan psikologis. Analisis dilakukan terhadap variabel *political engagement*. Penelitian tersebut menemukan bahwa faktor *political information* nampak memiliki korelasi yang signifikan de-

ngan *voter turnout* dalam Pemilu legislatif 2004. Namun faktor *political – information* nampak tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan *voter turnout* dalam Pemilu Presiden Putaran I dan Pemilu Presiden Putaran II. Sedangkan faktor *partisanship* (Party ID) nampak memiliki korelasi dengan *voter turnout* baik dalam Pemilu Legislatif 2004, *voter turnout* dalam Pemilu Presiden Putaran I dan Pemilu Presiden Putaran II.

#### Korelasi *Political Engagement* dan *Voter turnout*

	Turnout legislative 2004	Turnout Presiden I 2004	Turnout Presiden II 2004
Political information	.087*	TS	TS
Partisanship	.114*	.105*	.122*

**Sumber:** Saiful Mujani (2007), *Voting Behavior Kasus Indonesia*. Bahan Kuliah di Program Pasca Sarjana Master Manajemen Komunikasi FISIP UI. Maret, 2007

Dari hasil analisis *bivariate* tersebut, Mujani (2007) menyimpulkan beberapa hal penting. *Pertama*, tingkat partisipasi dalam pemilu legislatif dalam 3 kali pemilu legislatif menunjukkan adanya kecenderungan menurun, meskipun secara keseluruhan masih tinggi, di atas 75%. *Kedua*, tingkat partisipasi dalam pemilihan presiden juga tinggi, di atas 75%, meskipun ada penurunan dari pemilihan presiden tahap pertama dan kedua. *Ketiga*, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi meliputi : 1. Partisanship: Dampaknya positif terhadap partisipasi dalam pemilu. 2. Intensitas dalam kegiatan sosial-keagamaan: Warga yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial cenderung ikut memilih dalam pemilu. Mengapa demikian? Kegiatan sosial-keagamaan media yang membantu komunikasi antara warga bahwa pemilu penting untuk kepentingan publik. 3. Umur: Semakin tua warga cenderung ikut dalam pemilu, meskipun hubungan ini mungkin tidak linear, sebab ketika seorang warga mencapai umur yang lebih lanjut hambatan-hambatan fisik untuk ikut datang ke TPS semakin besar. Hubungan antara umur dan ikut serta dalam pemilu kemungkinan membentuk kurva-J. 4. Pendidikan: Semakin tinggi tingkat pendidikan warga cenderung absen dalam pemilu. Warga yang apatis dan skeptis terhadap pemilu datang dari warga yang lebih berpendidikan. Ini berbeda dengan pola di Amerika

misalnya. 5. Urbanisme: Warga yang tinggal di perkotaan, dibanding yang tinggal di pedesaan, cenderung absen dalam pemilu. 6. Media massa: Media massa tidak punya pengaruh terhadap keikutsertaan dalam pemilu.

Dari riset yang dilakukan tersebut, Mujani (2007) juga menyimpulkan kecenderungan adanya satu tipe "pemilih naif" dalam politik Indonesia. Pemilih naif ini ditandai oleh pola yang menunjukkan bahwa partisipasi dalam pemilu secara positif dipengaruhi oleh sikap partisan dan keterlibatan dalam kehidupan sosial-keagamaan dan kelompok warga yang lebih berumur di satu sisi, dan di sisi lain warga yang lebih berpendidikan, lebih baik pendapatannya, dan tinggal di perkotaan, cenderung absen dalam pemilu. Kelahiran pemilih naif ini dapat berimplikasi pada kurang berkualitasnya hasil pemilihan umum Indonesia sebab warga yang berpendidikan, yang berpendapatan lebih baik, dan tinggal di perkotaan cenderung tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Pemilu cenderung menjadi pesta orang desa, orang tua, orang yang kurang berpendidikan, dan orang miskin.

Fenomena "pemilih naif" tersebut perlu dilihat lebih jauh dalam menjelaskan fenomena besarnya angka Golput di sejumlah daerah dalam arena Pilkada di Indonesia. Setidaknya ada dua hal penting yang perlu dijawab dengan penelitian Golput lebih lanjut dalam arena Pilkada di Indonesia. *Pertama*, pada sejumlah daerah dengan latarbelakang urban yang rendah dan mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan Golput masih menunjukkan angka yang tinggi. Hal ini misalnya terlihat pada level propinsi dalam Pilkada Jateng dan pada Pilkada Kabupaten/Kota dalam Pilkada Kabupaten Pati, Jateng. *Kedua*, sebagian peserta pemilih dalam arena Pilkada merupakan pemilih dengan pendidikan menengah ke bawah. Mengacu pada temuan Mujani (2004), hal ini tentunya cukup kontras. Karena fakta politik menunjukkan di sejumlah daerah dengan tingkat angka Golput tinggi, mayoritas pemilih adalah dengan pendidikan kelas menengah bawah.

Selain studi di atas, sejumlah studi terhadap perilaku Golput nampak belum banyak dikembangkan di Indonesia baik dalam arena Pemilu dan Pilkada. Ada sejumlah *event* Pemilu yang telah digelar pasca reformasi. Selain itu, ratusan *event* Pilkada juga telah diselenggarakan di Indonesia. Studi terhadap fenomena Golput dapat difokuskan pada dua hal

di atas. *Pertama*, prediksi aktual akan potensi Golput yang biasanya didapatkan dari data survei pra-pemilihan. *Kedua*, fakta Golput yang muncul pasca berlangsungnya pemilihan.

Secara metodologis, penelitian yang berkembang terhadap fenomena Golput dilakukan dengan dua hal. *Pertama*, penelitian Golput pada level agregat dengan menggunakan data agregat. Penelitian Golput model ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data agregat yang ada dari berbagai fakta Golput di sejumlah wilayah/negara. Hal ini misalnya banyak dilakukan oleh International IDEA.

*Kedua*, penelitian Golput pada level individual, yaitu dengan menggunakan data survey<sup>6</sup> dan juga data eksperimen. Penelitian dengan pada level individual dengan berdasarkan metode survey dilakukan bersamaan dengan *event* pemilihan yang sedang berlangsung. Mereka yang menjadi responden dalam survei merupakan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih mereka dalam arena pemilihan.

### Dua Perspektif: Studi Gerakan Politik dan Studi Perilaku Pemilih

Setiap kali berlangsung *event-event* Pemilu dan Pilkada, Golput menjadi sebuah perdebatan terpenting diantara para ahli, peneliti, politisi dan para pengamat. Kendati demikian, sudut pandang mereka dalam melihat dan melakukan analisis terhadap fenomena golput nampak cenderung beragam. Ada diantaranya yang mengkaji dalam konteks sosiologi gerakan politik, namun ada juga yang mengkaji sebagai sebuah wilayah studi perilaku politik dan psikologi politik.

Secara umum dapat disimpulkan, studi atas fenomena Golput di Indonesia dapat dikembangkan dengan dua perspektif. *Pertama*, kajian Golput sebagai sebuah gerakan politik. *Kedua*, Golput sebagai bagian dari perilaku pemilih, baik sebatas sebagai persepsi atau opini tentang Golput ataupun perilaku atas Golput.

---

6 Contoh penelitian terhadap Golput dengan menggunakan data survey dalam Pilkada DKI Jakarta misalnya dapat dilihat dalam Eriyanto, *Golput Dalam Pilkada*, Kajian Bulanan. Edisi 05 September, 2007, Lingkaran Survei Indonesia.

Fenomena golput yang dilihat sebagai bagian terpenting dari isu gerakan politik yang dilakukan oleh beberapa kelompok kalangan masyarakat merupakan sebuah gerakan politik yang dapat dilakukan baik oleh para kalangan yang bersaing dalam pertarungan politik, ataupun kalangan yang merasa kecewa dan tersingkirkan dari arena pertarungan politik. Studi Golput dalam konteks ini biasanya dilakukan dengan metode-metode kualitatif, termasuk *participatory observer* dengan berbagai pendekatan—termasuk pendekatan kritis, sesuai dengan target penelitian yang hendak dicapai.

Golput sebagai sebuah opini pemilih atas perkembangan fakta politik yang terserap dalam beberapa survey prediksi menjelang pemilihan. Adanya sikap dari para pemilih yang belum bersedia menyatakan pilihan politiknya, belum merasa terwakili, terakomodasi kepentingannya maupun berbagai alasan teknis lainnya sehingga tidak memberikan jawaban dalam berbagai survey prediksi. Studi tentang Golput dalam konteks ini didasarkan pada hasil-hasil survey. Dalam studi ini, fluktuasi angka Golput juga dapat dilihat berdasarkan hasil *tracking survey* yang dilakukan oleh sebuah lembaga survey.

Golput sebagai fakta (perilaku) politik. Sebagai fakta politik, Golput hanya dapat diketahui melalui data-data agregat atau data survey (terhadap mereka yang golput pada saat pemilihan berlangsung), yang diperoleh pasca pemilihan. Golput tidak bisa dipahami validitas dan keakuratannya tanpa adanya data survey dan data agregat. Data agregat di sini dapat bersumber dari perhitungan setelah pemilihan berlangsung, baik yang dilakukan oleh KPU melalui TPS-TPS maupun yang dilakukan oleh lembaga-lembaga para pemantau pemilu.

Ada berbagai kemungkinan untuk mengembangkan studi atas fenomena golput di Indonesia. Hingga saat ini literature yang mengkaji fenomena golput di—baik dalam konteks local dan nasional di Indonesia nampak masih kurang. Selama beberapa dekade, mayoritas ilmuwan politik cenderung fokus pada partai politik pemilu dan perilaku pemilih di Indonesia, baik pada masa Orde Baru dan Pasca Orde Baru (Evans, 2003). Hampir dari mayoritas literatur hasil riset bidang ilmu politik dan ilmu komunikasi politik di Indonesia lebih cenderung fokus pada partisipasi politik, budaya politik dan *political engagement* berdasarkan data survei (Gaffar, 1992; Mujani, 2003). Sementara itu, sejumlah literatur riset lainnya

melakukan eksplorasi fenomena partai politik dan pemilu dengan menggunakan data agregat (Mallarangeng, 1997; King, 2001; Ananta, Arifin dan Suryadinata, 2004).

Sebagai fenomena politik, setidaknya ada dua hal mendasar yang menjadi fokus analisis ketika memahami Golput. *Pertama*, prediksi aktual akan potensi Golput. *Kedua*, fakta Golput yang muncul pasca berlangsungnya pemilihan. Estimasi aktual akan potensi Golput ini dalam banyak hal lebih sering menjadi perdebatan dan mengundang komentar dari berbagai pakar. Estimasi aktual akan potensi Golput ini biasanya diperoleh dari sejumlah survei pra-pemilihan dimana di dalamnya menjelaskan sikap responden yang masih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan mendatang. Berbeda dengan estimasi aktual akan potensi Golput, fakta Golput ini bukan lagi asumsi politik. Besaran angka Golput pasca pemilihan merupakan fakta politik, yang berdampak pada kemenangan dan kekalahan masing-masing kandidat.

Pada berbagai arena Pemilu dan Pilkada, fenomena golput terus menjadi fakta politik yang menyisakan banyak misteri bagi kemenangan dan kekalahan kandidat dan parpol. Studi terhadap fenomena golput dalam hal ini bisa dikembangkan melalui ketiga kerangka analisis di atas, baik dalam skala komparatif maupun—dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif—maupun dengan analisis yang berbasis pada studi kasus dalam konteks Pemilu maupun Pilkada.

Faktor-faktor yang menjadi potensi yang berpengaruh terhadap perilaku golput di atas tentu kian menarik untuk dikembangkan dalam sejumlah riset. Selain itu, sejumlah faktor lainnya nampaknya juga penting untuk terus menerus dieksplorasi. Konteks pemilihan juga penting menjadi fokus analisis terhadap fenomena golput di Indonesia. Arena Pemilihan DPD dan Pilkada, yang berbasis pada pilihan kandidat tentu saja akan berbeda dengan konteks pemilu legislatif yang melibatkan pada pilihan kandidat dan partai (DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota dan Propinsi). Ke depan dibutuhkan berbagai studi yang memadai terkait dengan menguatnya angka Golput dalam arena Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pilpres di Indonesia. Perspektif sosial-kultural lainnya dan perspektif *rational choice* di sini kian penting untuk terus dieksplorasi, untuk mendapatkan penjelasan lebih akurat mengenai teka-teki Golput. \*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ananta, Aris, Arifin, Evi Nurvidya and Suryadinata, Leo (2004). *Indonesian Electoral Behavior: A Statistical Perspective*, Indonesian Population Series, No.7, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies.
- Budiman, Arif (2003). 'Demokrasi, Materi dan Golput,' *Kompas*, 11, Desember, 2003.
- De Sipio, Louis, Masuoka, Natalie and Stout, Chistopher (2006). 'The Changing Non-Voter: What Differentiates Non-Voters and Voters in Asia, American and Latino Communities?' *Jurnal Center for Study of Democracy*, University of California, Irvine. Paper 0611.
- Eriyanto (2007). 'Golput Dalam Pilkada', *Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia*, Edisi 05 – September, 2007.
- Eriyanto (2007). 'Partai Politik dan Peta Studi Perilaku Pemilih di Indonesia.' *Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia*. EDISI 06 - Oktober 2007
- Eriyanto, Sukanta dan Nyarwi, Ahmad (2007). 'Golput : Seberapa Berdampak Bagi Perolehan Suara Kandidat.' *Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia*, Edisi 05 – September, 2007.
- Evans, Kevin R. (2003). *The History of Political Parties and General Election in Indonesia*, Jakarta, Aries Consultancies.
- Franklin, Mark N. (2002). *The Voter Turnout Puzzles*. Paper dipresentasikan pada *The Fulbright Brainstorm Conference on Voter Turnout*. Lisbon, Portugal. February 2002.
- Gaffar, Affan (1992). *Javanese Voters: A Case Study of Election under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haromain, A. Malik (2003). 'Golput Cermin Kegagalan Partai,' *Kompas*, 23 September 2003.
- Hendardi (2004). 'Golput, Bagian Dari Demokrasi,' *Kompas*, 6 Juli, 2004.
- King, Dwight Y (2001). *Half-Heartened Reform: Election Institution Under a Hegemonic Party System*, Westport, Connecticut: Praeger.
- Liddle, R. William (1992). *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES.



- Mallarangeng, Andi (1997). *Contextual Analysis on Indonesian Electoral Behavior*. Thesis PhD tak terpublikasi,, Department of Political Science, Northern Illinois University.
- Mujani, Saiful (2003). *Religious Democrats: Democratic Cultures and Political Participation in Post-Soeharto Indonesia*. Thesis PhD tak terpublikasi. Department of Political Science, The Ohio State University.
- Mujani, Saiful (2004). 'Mitos Golput,' *Kompas*, 25 Mei, 2004.
- Mujani, Saiful (2007). *Voting Behavior Kasus Indonesia*. Bahan Kuliah di Program Pasca Sarjana Master Manajemen Komunikasi FISIP UI. Maret, 2007
- Nasikun, J. (2004). 'Golput, Siapa Takut?' *Kompas*, 6 Januari, 2004.
- Nyarwi, Ahmad (2007). 'Mengelola Golput dalam Pilkada DKI' , *Media Indonesia*, 12 September.
- Pilliang, Indra J (2004). 'Golput dan Masyarakat Baru Indonesia,' *Kompas*, 28 Juli, 2004.
- Pintor, Rafael Lopez, Gratschew, Maria and Sullivan, Kate (2001). *Voter Turnout Rates from a Comparative Perspective*. Stockholm : International IDEA.
- Rachman, M. Fadjroel (2004). 'Golput, Pemenang Pemilu 2004.' *Kompas*, 15 Mei, 2004.
- Tim Litbang Kompas (2004). 'Geliat Golput, Makin Tampak dari Masa ke Masa,' *Kompas*, 24, Februari, 2004.
- Weber, Douglas (2005). *A Consolidated Patrimonial Democracy? Democratization in Post-Soeharto Indonesia*. Paper presented at the workshop, "Post-Cold War Democratization in the Muslim World: Domestic, Regional and Global Trends", Joint Sessions of the European Consortium of Political Research, Granad, 14-19 April 2005.